



Pansus? Harus Ada Hasilnya

PONTIANAK-RK. Setakat ini, memang hanya anggota DPRD Kota Pontianak saja yang punya nyali mengkritisi kebijakan pemerintah. Tak cuma pepesan kosong cuap-cuap akan begini akan begitu.

Lihat saja, ketika DPRD Kalbar mencuatkan sebersit ide membuat panitia khusus (Pansus) terkait temuan BPK soal aset pemerintah provinsi, Dewan Kota Pontianak

■ Halaman 7

Pansus? Harus Ada Hasilnya

tanpa banyak bunyi langsung membentuk Pansus Perizinan ketika mendapat laporan ada izin pasar modern yang tak lengkap.

Terkait gagasan membentuk Pansus dari anggota DPRD Kalbar yang mengambang dan setiap tahun mencuat sesaat, Presidium Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalbar, Hidayat Kalijar, meminta hak para Dewan membentuk Pansus tidak disalahgunakan.

"Yang kita takutkan, pembentukan pansus penjagaan dan pengawasan aset daerah bukan benar-benar untuk mengawasi aset daerah dan penggunaan anggaran untuk aset itu, tapi malah mencari keuntungan. Jika benar itu terjadi, hal ini membuktikan rendahnya kinerja DPRD Provinsi Kalbar," katanya kepada Rakyat Kalbar, Senin (3/8) malam.

Dia mengingatkan, pada tahun 2012, ada 5 dari 9 fraksi di DPRD Provinsi Kalbar yang menolak pembentukan Pansus aset Kalbar. Nah, itu yang bikin sejumlah mahasiswa kecewa. Sudah gembar-gembor, eh malah tak kunjung terbentuk.

"Artinya, jika Pansus tidak terbentuk, alias hanya direncanakan saja, berarti DPRD menyepelekan pengawasan penggunaan aset daerah. Padahal, pembiayaan

aset Kalbar ini dianggarkan dalam APBD," tukas Hidayat.

Tutup dia, "Kami selaku mahasiswa dan masyarakat Kalbar takut jika terjadi penyelewengan penggunaan aset daerah karena selama ini monitoring dari DPRD Provinsi Kalbar sangat minim pada penggunaan, penjagaan, dan perawatan aset daerah Kalbar."

Lebih kurang senada, Dewan Penasehat Organisasi Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (DPO Imori) Kalbar, yang juga anggota Solmadapar, Casanova menambahkan, pembentukan Pansus itu sah-sah saja. Asalkan, hasil pembahasan di Pansus dipublikasikan.

"Soal aset daerah sampai saat ini tidak pernah benar-benar dibuka ke masyarakat, baik secara langsung maupun lewat media," kata dia.

Dia mencontohkan aset kebudayaan seperti Rumah Melayu dan Rumah Radakng di Kota Pontianak. "Sampai hari ini, kita tidak tahu apakah itu dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta. Kalau itu dikelola pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, harusnya ada laporan transparansi publik menurut UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik, red) nomor 14 tahun 2008. Jelas, masyarakat harus mengetahui itu.

Nah, termasuklah aset kendaraan dinas," papar Casanova.

Kemudian, walaupun Pansus terbentuk, jika Tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya tidak efektif justru sangat membuang-buang anggaran. "Ini yang paling urgen. Bentuk Pansus, habiskan anggaran tapi tidak ada hasil yang dilaporkan, jadi kita masyarakat yang merasa sangat dirugikan," tutur Casanova.

Menurut dia, sesuai studi bandingnya ke provinsi lain, dalam menjaga aset daerah maupun kebudayaan di Kalbar, pemerintah kurang memanfaatkan pemuda. "Sampai hari ini pemuda belum terjamah. Jadi, menurut saya, Pansus-Pansus yang katanya untuk menjaga aset lebih baik jangan dibentuk kalau tidak ada efektifitas kerjanya. Karena, banyak anggaran yang terbuang," tegas Casanova lagi.

Tutup dia, "Presiden pun sudah ngomong bahwa menjaga aset-aset daerah bukan hanya kebudayaan atau gedung-gedung bersejarah, tapi aset yang dianggarkan APBD dan APBNP juga harus dijaga dan tidak disalahgunakan, termasuk kendaraan dinas."

Laporan: Ocsya Ade CP
Editor: Mohamad iQbal